

SKRIPSI

PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT

TERHADAP EFEKTIVITAS ALOKASI DANA BOS (BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH)

DI KOTA PARE-PARE

SITI AULIA RAHMA. R

Nomor Stambuk: 10561 05102 14



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

SKRIPSI
PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT
TERHADAP EFEKTIVITAS ALOKASI DANA BOS (BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH)
DI KOTA PARE-PARE

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh
SITI AULIA RAHMA. R
Nomor Stambuk: 10561 05102 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Di Kota Pare-Pare
Nama Mahasiswa : Siti Aulia Rahma. R
Stambuk : 10561 05102 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. DR. Alvas, M.S

Pembimbing II



Dr. Hj. Ilhvani Malik, S.Sos, M.Si

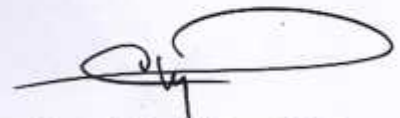
Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ilhvani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



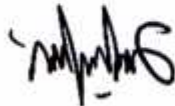
Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0007/FSP/A.1-VIII/II/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Abd Kadir Adys, SH, MM (ketua)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si
4. Nasrul Haq, S.Sos, M. PA



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Aulia Rahma R
Nomor stambuk : 105610510214
Program : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabiladikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar,14 Februari 2019

Yang Menyatakan

Siti Aulia Rahma R

ABSTRAK

SITI AULIA RAHMA. Pengaruh Pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS di kota Pare-Pare. (Dibimbing oleh Alyas dan Ihyani Malik)

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan dengan rencana yang telah ditetapkan, berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggabarkan dan menjelaskan Pengaruh Pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS di kota Pare-pare.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan inspektorat dalam pengawasan terhadap efektivitas alokasi dana BOS. Jenis penelian ini deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel menggunakan teknik Cluster Sample (sampel kelompok). Sehingga pada penelitian ini Jumlah keseluruhan populasi yaitu 207 orang yang diambil dari Kantor inspektorat kota Pare-Pare sebanyak 34 orang (seluruh pegawai), 20 orang di SD Negeri 4, 83 orang di SMP Negeri 1, dan 70 orang di SMP Negeri 3 Pare-pare yang terdiri atas kepala sekolah, guru, staf, dan honorer . Dari populasi tersebut diambil 50% dari populasi sehingga jumlah sampelnya adalah $50\% \times 207 \text{ orang} = 103,5$ dibulatkan menjadi 104 orang. Pengumpulan data di lakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Alat analisis menggunakan Regresi Sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Hal ini dibuktikan dengan hasil regresi dimana tingkat signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sedangkan t hitungnya sebesar 5,989. Hal ini diperkuat dengan hasil determinasi dimana kontribusi pengaruh pengawasan inspektorat sebesar 35,2% dan 64,8% dipengaruhi oleh variable lainnya.

Kata kunci : *Pengawasan ,efektivitas*

KATA PENGANTAR



“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Prof. DR. Alyas, M.S selaku Pembimbing I dan Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
6. Buat saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
7. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
8. Kakanda Iis Ariyani yang telah berbagi ilmu kepada penulis, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Buat teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 014, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Reski Devi S.Sos, Andi Annisa As, Fera Juliana Fajar, Dian Ayu Lestari, Asriayu Mursal, Musdalifah S.Sos, Selviana Arsyad S.Sos, Sarmila S.Sos, Mentari Nadila Sari, Siti Hutami Sudirman S.Sos, Dian Lestari S.Sos, Lilis Cahyani, Dian Lestari, S.Sos, Yusparandi, Erwin, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabatku Nuraini Syah, Muspayani, Afridha, Amira, Ari Putra dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 14 Januari 2019

Penulis,

Siti Aulia Rahma

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Ke Aslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Pengawasan	8
1. Pengertian	8
2. Teori Pengawasan	8
B. Konsep Efektivitas	13
1. Pengertian Efektivitas	13
2. Ukuran Efektivitas	17
C. Tugas Dan Fungsi Inspektorat	20
D. Dana Bantuan Operasional Sekolah	22
1. Pengertian Dana BOS	22
2. Tujuan Dana BOS	24
3. Sasaran Program Dana BOS	24
E. Kerangka Pikir	25
F. Definisi Operasional	27
G. Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel	30

D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	35
BAB VI HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	40
A. Karakteristik Objek Penelitian	40
1. Sejarah Kota Pare-Pare	40
2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Pare-Pare	43
3. Visi dan Misi Perusahaan	43
B. Hasil Penelitian	46
1. Deskripsi Karakteristik Responden	46
2. Deskripsi Variabel Pengawasan Inspektorat (X)	50
3. Deskripsi Variabel efektivitas (Y)	58
4. Uji Asumsi Klasik	69
C. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Sampel Penelitian.....	31
Tabel 3.2	Kriteria Jawaban Responden	35
Tabel 4.1	Data Sekolah di Kota Pare-Pare	46
Tabel 4.2	Realisasi Dana Bos Triwulan III & IV Tahun 2017	47
Tabel 4.3	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	49
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	49
Tabel 4.6	Deskripsi Indikator Ukuran Pelaksanaan	50
Tabel 4.7	Deskripsi Indikator Penilaian	53
Tabel 4.8	Deskripsi Indikator Pengadaan Koreksi	55
Tabel 4.9	Deskripsi Indikator Pengadaan Koreksi	59
Tabel 4.10	Deskripsi Indikator Produktifitas	61
Tabel 4.11	Deskripsi Indikator Efisiensi.....	63
Tabel 4.12	Deskripsi Semangat Kerja	66
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas	69
Tabel 4.14	Hasil Uji Reliabilitas	70
Tabel 4.15	Hasil Uji Normalitas	71
Tabel 4.16	Hasil Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.17	Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
Tabel 4.18	Hasil Uji Regresi Indikator Ukuran Pelaksanaan Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare	73
Tabel 4.19	Hasil Koefisien Determinasi Hubungan Ukuran Pelaksanaan Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS	74

Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Indikator Penilaian Terhadap Efektivitas Alokasi na BOS di Kota Pare-Pare	75
Tabel 4.21 Hasil Koefisien Determinasi Hubungan Penilaian Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS	75
Tabel 4.22 Hasil Uji Regresi Indikator Pengadaan Koreksi Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare	75
Tabel 4.23 Hasil Koefisien Determinasi Hubungan Pengadaan Koreksi Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS	76
Tabel 4.24 Hasil Uji Regresi Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.....	76
Tabel 4.25 Hasil Koefisien Determinasi Hubungan Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS	77
Tabel 4.26 Hasil Uji f Hubungan Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS	77
Tabel 4.27 Hasil Uji t Hubungan Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir	26
-----------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan masyarakat terutama para penerus-penerus bangsa. Penerus bangsa yang tidak lain yaitu anak-anak yang memiliki potensi untuk membuat negara ini menjadi negara yang maju, aman, dan sejahtera. Bentuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas melalui pendidikan baik formal atau informal demi mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap anak bangsa. Penyediaan pendidikan adalah sebuah keharusan dan kewajiban bagi pemerintah, karena Negara yang maju dan Negara yang kuat dilihat seberapa baik pendidikan yang dimilikinya.

Dalam mencerdaskan anak bangsa tentunya sistem pendidikan harus sesuai dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan, khususnya dalam penyediaan peralatan pendidikan, penyediaan tempat dalam melakukan proses pendidikan, karena pendidikan adalah sebuah upaya untuk memanusiakan manusia. Pendidikan berfungsi sebagai media dalam memandirikan manusia baik itu secara individu maupun kelompok, mengembangkan potensi yang dimiliki seluruh manusia itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya yang besar baik itu sumber daya alamnya yang sangat melimpah maupun sumber daya manusia yang kuantitasnya sangat banyak, Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak ke

tiga di dunia, namun dalam hal kualitas sumber daya manusia masih sangat kurang, oleh sebab itu pemerintah membuat peraturan bahwasannya pendidikan dasar bagi anak mulai umur 7-16 tahun wajib belajar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan dasar wajib 9 tahun merupakan cara agar meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 13 ayat (1) ditetapkan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu“, dan Pasal 11 ayat (1) menyatakan ”pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi“.

Pada umumnya pendidikan di Indonesia masih kurang dalam pengadaan sarana dan prasarana, meskipun pemerintah sudah melakukan upaya seperti membangun sekolah di daerah terpencil, mengirim tenaga-tenaga kerja khususnya guru ke desa-desa terpencil yang ada di Indonesia akan tetapi masih saja ada anak bangsa yang masih belum bisa menikmati sarana dan prasarana yang lengkap. Pendidikan di Indonesia pun cukup dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara

lain. Namun pemerintah tidak putus asa dengan ketertinggalan ini, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya pemerintah Kota Pare-pare dalam meningkatkan kualitas pendidikan menjadi semakin baik.

Pemerintah menyediakan bantuan pendidikan yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada masing-masing sekolah di Kota Pare-Pare sebagai sarana agar anak-anak di Kota Pare-Pare dapat mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali karena pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting. Dengan adanya program ini Inspektorat memiliki tugas yang sangat penting dalam program Dana Bantuan Operasional Sekolah, menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program-program Pemerintah.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat kota Pare-Pare merupakan unit pengawasan fungsional di daerah dan melakukan pengawasan di setiap unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintah yang bersih, transparansi dan akuntabel.

Inspektorat kota Pare-Pare merupakan insitusi pengawasan yang internal di lingkungan Pemerintahan kota Pare-Pare, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Walikota Pare-Pare Tahun 2013-2018 yaitu terwujudnya kota Pare-Pare yang maju, peduli, mandiri, dan bermartabat. Oleh karena itu Inspektorat kota Pare-Pare perlu menetapkan program dan rencana kerja untuk mencapai terwujudnya visi tersebut. Salah satu dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pare-

Pare yaitu pengawasan atau kegiatan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kegiatan ini merupakan agenda audit pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi peran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir adanya penyelewengan dan deteksi dini terhadap pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Namun kenyataannya sampai saat ini inspektorat masih memiliki kendala dalam pekerjaan, pada saat melakukan pengawasan di sekolah yang ada di kota Pare-Pare seperti, susah mendapatkan dokumen yang diminta oleh inspektorat, ketidaksiapan bendahara memperlihatkan data dikarenakan belum sepenuhnya menyelesaikan atau mengolah data/tugasnya dan juga mengulur-ulur waktu. Adapun masalah lain yaitu masih ada pnggunaan dana BOS yang tidak sesuai pada pelaksanaan dana BOS yang didapati di beberapa sekolah di kota Pare-Pare, dimana dana BOS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai petunjuk teknis BOS yang tercantum dalam juknis, misalnya adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga yang diluar dari kegiatan dinas pendidikan atau yang tidak berkaitan dengan sekolah, tetapi sekolah menggunakan dana BOS untuk mengikuti kegiattan tersebut. Adapun beberapa sekolah di kota pare-pare yang memiliki permasalahan hampir sama, yaitu SDN 4, SMPN 2, dan SMPN 3 di kota Pare-Pare yang saya dapati pada saat melakukan observasi awal di kantor Inspektorat kota Pare-Pare yakni dimana Administrasi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS yang belum tertib, seperti terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana BOS

tidak dilengkapi bukti-bukti pendukung serta penyempurnaan penulisan bukti-bukti tersebut, penanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid).

Inspektorat sangat berperan penting dalam hal pengawasan maupun pemeriksaan penggunaan dana BOS di tiap sekolah yang dijadikan sampel oleh pihak Inspektorat, maksudnya sampel disini adalah dimana tidak semua sekolah di kota Pare-Pare diawasi dan diperiksa oleh Inspektorat selebihnya diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), hanya ada beberapa sekolah yang diperiksa oleh Inspektorat seperti SDN 37, SDN 85, SD Katolik, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMPN 3, SMPN 2, dan masih ada beberapa yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Untuk tingkat menengah keatas atau SMAN maupun SMA Swasta, inspektorat kota Pare-Pare tidak turun langsung dalam pengawasan atau pemeriksaan terkait dana BOS yang digunakan karena Inspektorat provinsi yang akan turun langsung memeriksa dan mengawasi.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan badan Inspektorat Pare-Pare terhadap penyediaan dan penyaluran dana BOS tersebut diharapkan agar dana yang masuk ke setiap sekolah digunakan secara baik, efisien dan seefektif mungkin tanpa adanya pelanggaran dan penyimpangan dana BOS, agar terciptanya kualitas dan mutu pendidikan yang baik di Kota Pare-Pare. Serta berkurangnya anak yang pengangguran sekolah di Kota Pare-Pare. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengalokasian dana Bos yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Pare-Pare peneliti mengangkat judul “ **Pengaruh**

Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.”

A. Rumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "**Bagaimana pengaruh pengawasan inspektorat terhadap efektifitas alokasi dana BOS di Kota Pare-Pare**".

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Seberapa baik pengaruh pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS di Kota Pare-Pare?
2. Seberapa efektif pengalokasian dana BOS di Kota Pare-Pare?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan inspektorat dalam pengawasan terhadap efektivitas alokasi dana BOS di Kota Pare-Pare?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi terutama yang berkaitan dengan pengaruh peran pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam membuat sebuah program kerja yang baik untuk masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian khususnya administrasi untuk terfokus pada Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di kota Pare-Pare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

1. Pengertian

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry mendefinisikan istilah pengawasan adalah “*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

2. Teori Pengawasan

Teori Pengawasan menurut Terry dalam Winardi (2000) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan.

Rahardjo Adisasmita (2006:107) dalam (Riska,2014) “adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakalah prestasi tidak seperti yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan:

1. Menjamin pekerjaan mengikuti rencana
2. Mencegah kekeliruan
3. Memperbaiki efisiensi
4. Mewujudkan ketertiban pada pekerjaan
5. Menjajaki dan memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan.
6. Mengenali dan menggambarkan prestasi yang maksimal
7. Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan

Suatu pengawasan dapat dinilai efektif, apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pengawasan mudah dipahami
2. Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu
3. Pengawasan bersifat ekonomis
4. Pengawasan diterima oleh pekerja/ pegawai dan pimpinan

Rahardjo Adisasmita (2006:107) dalam (Riska 2014) menyatakan bahwa pengawasan adalah : “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”

Pendapat berbeda yang lain pun dipaparkan oleh Tanjung dan Mondeong (1999:82) dalam Adisasmita (2006), menyatakan bahwa: “pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”.

Pendapat lain dari Muchsan dalam Huda (2007:33) menyatakan bahwa: “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/ *plan*).

Mockler memberikan pendapat dalam Huda (2007:34) bahwa “pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi maupun umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan” .

Untuk mengetahui ukuran dalam pengawasan, maka digunakan tiga karakteristik ukuran didalamnya, yaitu:

1. Menentukan ukuran pelaksanaan, yaitu kegiatan yang digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Memberikan penilaian, yaitu memberikan penilaian terhadap hasil kerja dalam kegiatan pengawasan.
3. Mengadakan korektif (koreksi), yaitu tindakan mengoreksi atau mengevaluasi berbagai metode pengawasan.

Dari keseluruhan pendapat di atas maka, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan adalah kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan cara mengamati dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Adapun pengertian pengawasan fungsional berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2002 tentang Pertimbangan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa: “pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusunan, dan penilaian.

Menurut Donnelly (1996) dalam (Tondi, 2011) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan:

- a. Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan

penyimpangan pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasiln aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*cocurrent control*) adalah pengawasan yang dilakukan ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Cocurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Pengawasan *Freed Back* (*Freed Back Control*) yaitu pengawasa dengan mengukur hasil dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak tsesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya : *pertama*, pada

umunya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya, *kedua*, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal, *ketiga*, adanya percocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan, *keempat*, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan, *kelima*, apabila dalam percocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mengedisiplinkan pelaku kekeliruan itu,

B. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukandengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut pendapat Streers dalam (Juniadi, 2014:41) mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan

3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi.
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Efektifitas adalah suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep efektivitas dapat memberikan gambaran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya dan juga merupakan suatu konsep yang sangat luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson dalam (Agus, 2013) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kamus bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa “Efektivitas ialah dapat membawa hasil”. Ditinjau dari sudut pengertian umum, efektivitas menunjukkan keberhasilan dan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika kegiatan berhasil mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. Untuk lebih jelasnya berikut dikemukakan beberapa pengertian efektivitas dari beberapa ahli.

Menurut Handiki (2008) dalam (Kurniawan, 2005) bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau tegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005)

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) proses, maupun keluaran (output). Dalam hal yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Sedangkan menurut Georgopolous dan Tannenbaum (1985:50) “mengemukakan efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Selanjutnya Steers (1985) dalam (Georgopolous dan Tannenbaum, 1985) mengemukakan bahwa "efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu, serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya".

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2006) dalam (Tondi, 2011) yang menjelaskan bahwa : “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas. Maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978), yaitu :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatangi tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martini dan Lubis, yakni :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya. Baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output. Mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Duncan yang dikutip Steers (1985) dalam bukunya “*efektivitas organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian

tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengasian tenaga kerja.

C. Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga pengawasan pembangunan, baik pengawasan internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedang di pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh Inapektorat Daerah yang merupakan unsur pengawasa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah, diangkat dan

diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka inspektorat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan , pengusutan, pengujian, dan penelitian tugas pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja daerah. Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas dan pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dalam

kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keadaan informasi yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:

1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *qualitu assurance*
2. Penggunaan laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang lain.
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk mengakhiri apalagi menindak.

D. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Dana Bos

Program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dimulai sejak juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju kualitas.

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk bantuan

Pelaksanaan program BOS diatur dalam beberapa peraturan, yaitu :

1. Peraturan Presiden yang mengatur rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya.
3. Peraturan Menteri dalam negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari khas daerah ke sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dana dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan Menteri keuangan dan peraturan Menteri dalam Negeri tentang program BOS tidak dibahas kembali dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut peraturan Pemerintah No.48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada

beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

2. Tujuan dana BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD,SMP,SLTA Negeri terhadap biaya operasi sekolah.
- b) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
- c) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah.

3. Sasaran Program Dana BOS

Sasaran program Dana BOS adalah semua sekolah tingkat SD,SLTP,SLTA baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DEPODIKDASMEN). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Sekolah yang menerima kebijakan Alokasi minimal 60 peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. SD/SMP yang berada di daerah khusus, yang pendiriannya telah di dasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan Kementrian Desa Pembangunan Dearah Tertinggalan dan Transmigrasi.
2. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya atau,
3. Khusus untuk sekolah swasta, juga harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.

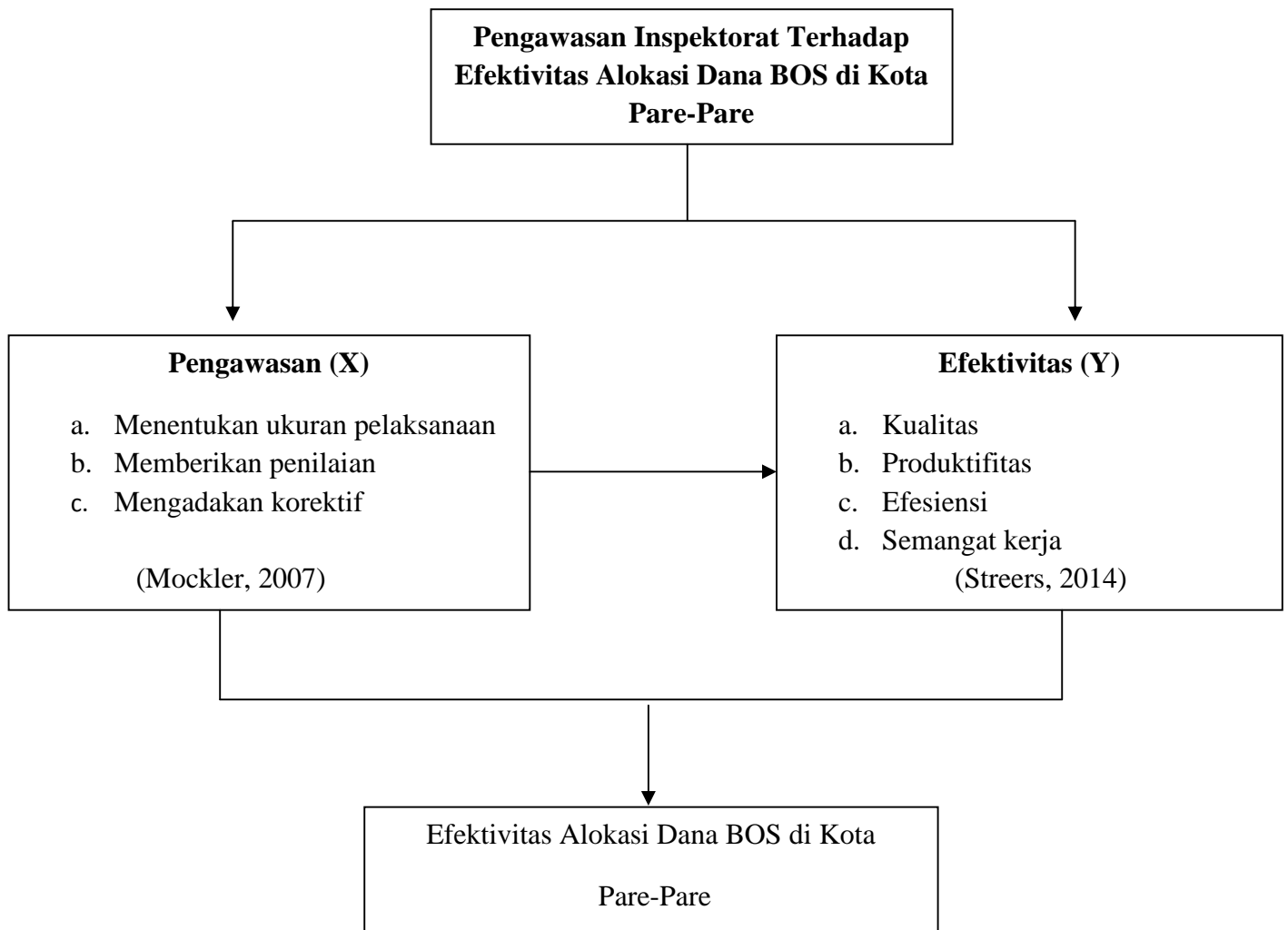
Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Harus menyampaikan inforemasi jumlah dana BOS yang diterima sekolah secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan di papan pengumuman.
2. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima.
3. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua peserta didik.

E. Kerangka Fikir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan berujuk pada teori yang di kemukakan oleh Mockler (2007) tentang pengawasan. Dalam teori tersebut ada beberapa indikator yang digunakan dalam konsep kerangka pikir dibawah ini, adapun variabel X yakni, a) menentukan ukuran pelaksanaan, b) memberikan penilaian, dan c) mengadakan korektif. Sedangkan untuk untuk variabel Y yakni, a)Kualitas, b) Produktifitas, c) Efisiensi, dan d) Semangat Kerja. Oleh sebab itu

penulis mengemukakan konsep penelitian ini dapat dilihat dari bagan berikut ini yang menjadikan teori tersebut sebagai indikator pada penelitian ini.



Gambar 2.1

F. Definisi Operasional

Pengaruh peran pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS, yakni sebuah proses dimana dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang mendukung hasil dari proses tersebut khususnya dalam fungsi inspektorat.

Variabel X:

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan, yakni cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti dalam pengawasan di inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS,
- b. Memberikan penilaian, yaitu memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai inspektorat dalam melakukan pengawasan alokasi dana BOS.
- c. Mengadakan korektif, adalah tindakan mengoreksi atau mengevaluasi berbagai metode pengawasan inspektorat, seperti standar yang terlalu tinggi dalam melakukan pengawasan efektivitas alokasi dana BOS.

Variabel Y:

- a) Kualitas adalah hasil yang terdapat pada kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan alokasi dana BOS di kota Pare-Pare.
- b) Produktivitas merupakan kuantitas dari jasa yang dihasilkan pada kinerja inspektorat dengan inisiatif-inisiatif yang dimiliki para pegawai dalam melakukan pengawasan dana BOS di Kota Pare-Pare.
- c) Efisiensi merupakan perbandingan dari beberapa aspek pada kinerja inspektorat dalam pengawasan alokasi dana BOS.

- d) Semangat kerja adalah adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan yang melibatkan usaha para pegawai inspektorat dalam melakukan pengawasandana BOS di Kota Pare-pare.

G. Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoritis, kerangka berfikir, dan hasil-hasil penelitian yang relevan diatas, dapat ditarik hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut :

H0 : Tidak ada pengaruh peran pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS

HI : Ada pengaruh peran pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 15 September S/d 15 November 2018 di Kantor Inspektorat dan di SDN 4 Kota Pare-Pare, SMPN 2 Kota Pare-Pare,serta SMPN 3 Pare-Pare.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat dan SDN 4 Kota Pare-Pare, SMPN 2 Kota Pare-Pare, serta SMPN 3 Pare-Pare. Penelitian tertarik mengambil lokasi di Kantor Inspektorat dan beberapa sekolah di kota Pare-Pare karena masih ada penggunaan dana BOS yang tidak sesuai pada pelaksanaan dana BOS dimana dana BOS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai petunjuk teknis BOS yang tercantum dalam juknis misalnya, adanya kegiatan-kegiatan oleh lembaga yang diluar dari Dinas Pendidikan atau yang tidak berkaitan dengan sekolah. Peneliti memilih Lokasi penelitian karena sesuai observasi awal, peneliti mendapati beberapa masalah yang hampir sama, yang terdapat pada SDN 4, SMPN 2, SMPN 3. Selain itu ketiga sekolah ini bertempat di kecamatan yang berbeda-beda. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS di kota Pare-Pare.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS di kota Pare-Pare, sekaligus menguji teori-teori yang terkait dengan pengawasan dan efektivitas alokasi dana BOS yang digunakan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan karena tujuannya untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan teori-teori terkait pengawasan dan efektivitas guna memecahkan masalah-masalah praktis di beberapa sekolah di kota Pare-Pare. Jenis penelitian ini berdasarkan tingkat kealamiah obyek yang diteliti termasuk jenis penelitian survey karena peneliti mendapat data dari tempat yang alamiah di Kantor Inspektorat dan di beberapa sekolah di Kota Pare-Pare dengan melakukan pemberian kuesioner dalam pengumpulan data penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di kantor Inspektorat sebanyak 34 orang dan juga di beberapa sekolah yang ada di kota Pare-Pare yaitu sebanyak 3 sekolah terdiri atas Kepala Sekolah, Guru, Staf, dan

Honorer, dengan populasi yakni di SD Negeri 4 Pare-Pare sebanyak 20 orang, SMP Negeri 2 Pare-Pare sebanyak 83 orang dan SMP Negeri 3 Pare-pare sebanyak 70 orang. Jadi kesimpulan pernyataan diatas maka jumlah populasi dari keseluruhan yaitu 207 populasi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang diberikan oleh populasi tersebut bila populasi besar. Dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *refresentif* (mewakili).

Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini yakni teknik *Cluster Sample* (sampel kelompok) adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok yang telah ditentukan dari anggota populasi. Pengambilan sampel untuk penelitian ini menurut Suharsimi Arikunto (2010:112), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.

Rumus yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah:

$$n = \% \times N$$

Keterangan :

n = besarsampel

N = besarpopulasi

Jumlah keseluruhan populasi yaitu 207 orang yang diambil dari Kantor inspektorat kota Pare-Pare sebanyak 34 orang (seluruh pegawai), 20 orang di SD Negeri 4, 83 orang di SMP Negeri 2, dan 70 orang di SMP Negeri 3 Pare-pare yang terdiri atas kepala sekolah, guru, staf, dan honorer . Dari populasi tersebut diambil 50% dari populasi sehingga jumlah sampelnya adalah $50\% \times 207 \text{ orang} = 103,5$ dibulatkan menjadi 104 orang. Alasan peneliti menggunakan 50% pada penentuan jumlah sampel karena:

- a) Penelitian ini sifatnya heterogen, sehingga semakin banyak jumlah sampel semakin bagus hasilnya (50%)
- b) Semua sampel yang digunakan dapat mewakili jumlah populasi yang ada.

Tabel 1. Daftar Sampel Penelitian

NO	Keterangan	Populasi	Presentase	Sampel
1	Inspektorat	34	50%	17
2	SDN 4	20	50%	10
3	SMPN 3	70	50%	35
4	SMPN 2	83	50%	42
	Jumlah	207		104

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulisan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu, pengumpulan data yang mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian dengan cara :

1. Observasi, yaitu suatu metode penilaian/pengamatan secara langsung yang sering digunakan untuk mengukur pengaruh pengawasan terhadap efektivitas alokasidana BOS di kota Pare-Pare.
2. Kuesioner, yaitu alat riset atau survey yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui daftar pertanyaan mengenai pengaruh pengawasan terhadap efektivitas alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.
3. Dokumentasi, yaitu kegiatan khusus untuk pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti: gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya) yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen secara sistematis mengenai pengaruh pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi Dana BOS di kota Pare-Pare.

b. Alat Pengukur Data

Dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang phenomena sosial. Alasan penulisan menggunakan skala *likert* karena lebih fleksibel daripada teknik pengukuran lainnya. Pemberian skor dengan menggunakan lima skala *likert* adalah sebagai berikut :

1. Jawaban sangat tidak setuju mendapat skor 1
2. Jawaban tidak setuju mendapat skor 2
3. Jawaban netral mendapat skor 3
4. Jawaban setuju mendapat skor 4
5. Jawaban sangat setuju mendapat skor 5.

c. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data:

Jenis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel

2. Sumber Data:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara langsung terhadap responden atau pihak-pihak yang terkait atau pun melalui kuisioner yang diberikan yaitu berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS di kota Pare-Pare.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa tulisan atau pun dokumen-dokumen yaitu laporan-laporan, buku-buku, jurnal-jurnal, karangan ilmiah dan sebagainya. Adapun sumber lainnya adalah berupa informasi-informasi dari pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

E. Teknik Analisis Data

Dari data hasil penelitian yang dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

1. Analisis Regresi sederhana

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah variabel dependen dengan satu atau dua beberapa variabel independen. Cara perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y' = a + b (X)$$

Keterangan

Y' = variabel dependen (nilai diprediksikan)

X = variabel independen

a = konstanta (nilai Y' apabila X=0)

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Rumus persentase skor untuk setiap indikator

$$\text{Indikator} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n r_{ji}}{n \cdot s \cdot u} \times 100 = \text{jumlah skor perolehan}$$

Hasil analisis regresi dapat digunakan pula untuk melakukan uji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Dasar pengambilan keputusannya, adalah :

- a. Jika nilai P value (sig) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. Jika nilai P value (sig) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Tabel 3.1 Kriteria Jawaban Responden

Persentase Jawaban	Tafsiran Kuantitatif
80% - 100%	Sangat Baik
60% - 79%	Baik
40% - 59%	Netral
20% - 39%	Kurang Baik
0% - 19%	Sangat Tidak Baik

2. Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah suatu analisis yang menggambarkan atau menguraikan pengawasan dalam meningkatkan profesionalisme kerja pegawai melalui kuosioner yang disebarakan kepada sejumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu pengujian untuk menguji apakah data-data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas data

menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov Test*. Uji *Kolmogrov-Smirnov Test* di pilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan dengan pengujian menggunakan grafik yang dapat dilihat dari tingkat signifikannya, diantaranya.

- a. Jika signifikan $< 0,05$ maka data terdistribusi normal
- b. Jika signifikan $> 0,05$ maka data tidak terdistribusi lengkap

4. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang bagus memiliki variable-variabel independen seharusnya tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat korelasi antar variabel independen, atau lewat angka variance inflation factor (VIF).

5. Uji Heterokedastitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Nilai signifikan korelasi $> 0,05$ ($=5\%$) maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastitas.

6. Uji Validitas

Uji Validitas item atau butir dapat dilakukan dengan menggunakan software versi 21 *for Windows*. Untuk proses ini, akan digunakan Uji *Korelasi Person Product Moment*. Dalam uji ini setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Dalam hal ini masing-masing item yang ada di dalam variabel X dan Y akan diuji relasinya dengan skor total variabel tersebut. Agar penelitian ini lebih teliti,

sebuah item sebaiknya memiliki korelasi (r) dengan skor total masing-masing variabel

0.05. item yang punya r hitung < 0.05 akan disingkirkan akibat mereka tidak melakukan pengukuran secara sama dengan yang dimaksud oleh skor total skala dan lebih jauh lagi, tidak memiliki kontribusi dengan pengukuran seseorang, jika bukan malah mengacaukan.

7. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Uji Reliabilitas dilakukan dengan *Uji Alpha Cronbach*.

Jika nilai $\alpha > 0,7$ artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika $\alpha > 0,8$ ini mensugestikan seluruh *item reliable* dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat atau, ada pula yang memaknakannya sebagai berikut :

- a. jika $\alpha > 0,9$ maka reliabilitas sempurna
- b. jika α antara $0,7 - 0,9$ maka reliailitas tinggi
- c. jika α antara $05 - 0,7$ maka reliabilitas moderat
- d. jika $\alpha < 0,5$ maka reliabilitas rendah

Jika α rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel: Segera identifikasi dengan prosedur analisis per item. Item analisis adalah kelanjutan dari tes *Alpha* sebelumnya guna melihat item-item tertentu yang tidak *reliable*. Lewat item

Analisis ini maka satu atau beberapa item yang tidak reliabel dapat dibuang sehingga *Alpha* dapat lebih tinggi lagi nilainya.

Reliabilitas item diuji dengan melihat Koefisien Alpha dengan melakukan *Reliability Analysis* dengan SPSS ver.21 *for Windows*. Akan dilihat nilai *Alpha-Cronbach* untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel. Agar lebih teliti, dengan menggunakan SPSS juga akan dilihat kolom *Corrected Item Total Correlation*.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Sejarah Kota Pare-Pare

Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena hobbynya memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.

Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “Baik dibuat pelabuhan Kawasan ini”. Sejak itulah melekat nama “Parepare”

Kota Pelabuhan. Parepare akhirnya ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebbber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda), dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare.

Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controlur atau Gezag Hebbber. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942.

Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di Daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.

Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedang Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini.

Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotaamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Pare-Pare

Sesuai Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat Kota Parepare merupakan unit pengawasan fungsional di daerah dan melakukan pengawasan di setiap unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Kota Parepare mempunyai tugas pokok yaitu Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kelurahan.

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Kota Parepare sebagai berikut :

- a. Perencanaan Program Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi Perusahaan

Berdasarkan visi dan misi Walikota Parepare pada RPJMD Tahun 2013 - 2018, yang menyebutkan bahwa :

- a. pada point penjelasannya tercantum mengenai “akan diselenggarakannya pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat”;
- b. pada misi ke empat dan Program Proirotas 3 yaitu “menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat”;
- c. serta isu-isu strategis yang telah yang telah diuraikan pada Bab III, maka sebagai tindak lanjut, Inspektorat telah menyusun visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

”Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Berdisiplin Melalui Pengawasan Yang Profesional”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan fungsional intern hendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN.
- b. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk meningkatkan peran serta Inspektorat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

hendaknya terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia serta aktif menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

Untuk melaksanakan visi tersebut, Inspektorat menyusun misi sebagai berikut :

Misi :

- a. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan antara lembaga pengawasan lainnya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan.
- c. Meningkatkan hasil pemutakhiran data LHP APFP.
- d. Meningkatkan penataan administrasi pengawasan.

Adapun penjelasan misi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menumbuhkembangkan sinergi pengawasan antara lembaga pengawasan lainnya diupayakan dengan membangun kerja sama dengan APIP lainnya misalnya dengan pihak BPKP.
- b. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan diupayakan peningkatan pengetahuan dan pengalaman dengan melakukan pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM baik Diklat Fungsional maupun Diklat Substansi.
- c. Untuk Meningkatkan hasil pemutakhiran data LHP APFP perlu adanya Sistem Pendataan yang lebih sistimatis.
- d. Untuk Penataan Administrasi Pengawasan diperlukan adanya Program Pengawasan yang lebih terarah dan terencana dengan menggunakan Audit Berbasis Resiko (Risk Based Audit)

Melalui pemahaman atas visi dan misi pengawasan diharapkan bisa dibangun komitmen pengawasan yang kuat dari seluruh komponen aparat pengawas fungsional Inspektorat Kota Parepare serta untuk menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pengawasan.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan jumlah sekolah negeri maupun swasta di kota Pare –Pare Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Sekolah di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan

Ket	Wilayah								Total	
	Kec. Soreang		Kec. Bacukiki Utara		Kec. Ujung		Kec. Bajukiki			
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
SD	24	6	26	1	20	3	10	-	80	10
SMP	3	4	3	3	3	2	4	1	13	10
SMA	1	2	2	2	2	1	-	-	5	5
SMK	1	4	1	2	1	3	-	1	3	10
SLB	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1

Sumber : <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/196100>

Berdasarkan table 4.1 diatas menjelaskan data sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di empat kecamatan yang ada di Kota Pare-Pare yaitu Kec. Soreang, Kec. Bacukiki Utara, Kec. Ujung dan Kec. Bajukiki. Jumlah Sekolah Dasar negeri di kota Pare-Pare sebanyak 80 sekolah dan swasta sebanyak 10 sekolah, SMP sebanyak 13 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta, SMA sebanyak 5 sekolah

negeri dan 5 sekolah swasta, SMK sebanyak 3 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta, sedangkan SLB sebanyak 1 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta.

Pengambilan sampel yang dilakukan penulis di dilakukan di empat tempat yaitu di kantor Inspektorat sebanyak 17 responden, SDN 4 sebanyak 10 responden, SMPN 2 sebanyak 35 responden dan SMPN 3 sebanyak 42 responden sehingga total keseluruhan sampel sebanyak 104 responden yang ada di kota Pare-Pare.

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Parepare Nomor: 700/272/Insp, tanggal 23 April 2018 untuk melaksanakan pemeriksaan Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dari tanggal 25 April s/d 14 Mei 2018, maka peneliti mendapatkan hasilnya sebagai berikut :

Tabel : 4.2
Realisasi Dana Bos Triwulan III & IV Tahun 2017

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Penggunaan (Rp)
1	SD Neg 4	261	83.520.000,-
2	SMP Neg. 3	809	324.800.000,-
3	SMP Neg. 2	989	399.600.000,-

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Dana BOS Pelaporan Triwulan III dan IV tahun 2017

Berdasarkan table 4.2 dijelaskan bahwa SD Neg. 4 memiliki jumlah siswa sebanyak 261 siswa dengan alokasi jumlah dana BOS sebesar Rp 83.520.000, SMP Neg. 3 memiliki jumlah siswa sebanyak 809 siswa dengan alokasi dan BOS sebesar Rp. 324.800.000, sedangkan SMP Neg. 2 sebanyak 989 siswa dengan alokasi dana BOS sebesar Rp 399.600.000. Dengan data tersebut dapat dikatakan

bahwa SMP Neg 2 mendapatkan alokasi dana BOS terbesar yaitu Rp 399.600.000 dibandingkan kedua sekolah lainnya. Data tersebut peneliti dapatkan dari hasil laporan evaluasi dana BOS pelaporan triwulan III dan IV tahun 2017.

Adapun karakteristik pegawai atau responden sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 104 orang. Berikut ini merupakan data responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.3
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
Laki-Laki	46	44 %
Perempuan	58	56 %
Total	104	100 %

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang atau 44 % sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 58 orang atau 56 %.

b. Umur

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan umur pada responden dari 25 tahun sampai 60 tahun. Penulis memberi batasan umur mulai 25 tahun karena pada usia tersebut sudah masuk dalam usia produktif dan pada usia 60 tahun ke atas itu sudah masuk dalam usia tidak produktif. Adapun table responden berdasarkan umur sebagai berikut :

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
25 – 35	14	14 %
36 – 45	30	29 %
46 – 55	42	40 %
>50	18	17 %
Total	104	100 %

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan table 4.2 menjelaskan bahwa karakteristik responden berdasarkan umur hampir merata, dimana responden yang berumur 25 – 35 tahun sebanyak 14 orang atau 14 %, usia 36 – 45 sebanyak 30 orang atau 29 %, usia 46 – 55 sebanyak 42 orang atau 40 % dan usia diatas >50 sebanyak 18 orang atau 17 %. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan umur terbanyak pada penelitian ini umur 46 – 55 sebanyak 42 orang.

c. Pekerjaan

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 104 orang. Berikut ini merupakan data responden berdasarkan pekerjaan.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Guru	75	72 %
Tata Usaha	10	10 %
Admin	2	2 %
Inspektorat	17	16 %
Total	104	100 %

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan table 4.3 menjelaskan bahwa karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, dimana responden yang berprofesi sebagai guru pengajar sebanyak 75 orang atau 72 %, tata usaha sebanyak 10 orang atau 10 %, admin sebanyak 2 orang atau 2 % dan lain-lain sebanyak 17 orang atau 16 %. Dengan

hasil ini dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan pekerjaan terbanyak pada penelitian ini sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai guru mengajar sebanyak 75 orang.

2. Deskripsi Variabel Pengawasan Inspektorat (X)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan inspektorat dimana terdiri dari tiga variable yaitu ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi digunakan frekuensi dan presentase. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan presentase untuk mengukur adalah sebagai berikut :

a. Ukuran Pelaksanaan

Menentukan ukuran pelaksanaan, yakni cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti dalam pengawasan di inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai ukuran pelaksanaan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6. Deskripsi Indikator Ukuran Pelaksanaan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Inspektorat sering melakukan inspeksi tempat/pengawasan langsung di sekolah mengenai Dana BOS	51	45	6	2	-	104
	Presentase (%)	49%	43%	6%	2%	-	100%
2	Inspektorat terlebih dulu menyusun program kegiatan audit (PKA) sebelum melakukan pemeriksaan di sekolah	42	52	9	1	-	104
	Presentase (%)	40%	50%	9%	1%	-	100%
3	Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP	31	58	13	2	-	104
	Presentase (%)	30%	56%	12%	2%	-	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2018

Berdasarkan table 4.4 dapat dikatakan pada pertanyaan pertama yang mengatakan “Inspektorat sering melakukan inspeksi tempat/pengawasan langsung

di sekolah mengenai dana BOS” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 51 orang dengan presentase 49 % yang menandakan responden sangat setuju jika pegawai Inspektorat sering melakukan inspeksi tempat/pengawasan langsung di sekolah mengenai Dana BOS , yang menjawab Setuju (S) sebanyak 45 orang dengan presentase 43 % sehingga dapat dikatakan bahwa sebanyak 43% responden menjawab setuju dengan pegawai Inspektorat sering melakukan inspeksi tempat/pengawasan langsung di sekolah mengenai Dana BOS , yang menjawab Netral (N) sebanyak 6 orang dengan presentase 6 %, yang dapat dikatakan bahwa terdapat 6 orang yang memilih netral yang menandakan sebanyak 6 orang responden yang tidak mengetahui tentang pengawsan yang dilakukan oleh Inspektorat, dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 orang dengan presentase 2 %, yang berarti sebanyak 2 orang responden yang tidak setuju dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat, sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Pada indikator ukuran pelaksanaan dengan pertanyaan “Inspektorat terlebih dulu menyusun program kegiatan audit (PKA) sebelum melakukan pemeriksaan di sekolah” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 42 orang dengan presentase 40%, yang artinya sebanyak 40% responden yang sangat setuju jika pegawai Inspektorat terlebih dahulu menyusun program kegiatan audit (PKA) sebelum melakukan pemeriksaan di sekolah, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 52 orang dengan presentase 50 %, yang artinya sebanyak 50% responden yang menjawab setuju dengan kegiatan penyusunan program kegiatan audit sebelum melakukan pemeriksaan di sekolah, yang menjawab Netral (N) sebanyak 9 orang

dengan presentase 9%, yang artinya sebanyak 9% responden yang tidak mengetahui tentang penyusunan program kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 1 orang dengan presentase 1 %, yang artinya sebanyak 1% responden yang tidak setuju jika pegawai Inspektorat melakukan program kegiatan audit sebelum melakukan pengawasan disekolah, sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Pada indikator ukuran pelaksanaan dengan pertanyaan “Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 31 orang dengan presentase 30 %, yang artinya sebanyak 30% responden sangat setuju dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai inspektorat yang sesuai dengan SOP, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 58 orang dengan presentase 56 %, yang artinya sebanyak 56% responden yang setuju dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai inspektorat yang sesuai dengan SOP, yang menjawab Netral (N) sebanyak 13 orang dengan presentase 12%, yang artinya sebanyak 12% responden yang tidak mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai inspektorat sudah sesuai dengan SOP dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 orang dengan presentase 2 %, yang artinya sebanyak 2% responden yang tidak setuju jika pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai inspektorat sesuai dengan SOP, sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

b. Penilaian

Memberikan penilaian, adalah memberikan penilaian pada setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan untuk mengetahui efektivitas kinerja pada inspektorat di kota pare-pare. Untuk mengetahui pendapat responden tentang indikator penilaian sebagai berikut :

Tabel 4.7. Deskripsi Indikator Penilaian

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Pengawasan dari inspektorat sangat membantu proses berjalannya program dana BOS	38	52	12	2	-	104
	Presentase (%)	36%	50%	12%	2%	-	100%
2	Inspektorat langsung memeriksa saat tiba di lokasi	44	36	22	2	-	104
	Presentase (%)	42%	35%	21%	2%	-	100%
3	Inspektorat sangat disiplin dalam proses pemeriksaan	58	34	9	2	-	104
	Presentase (%)	56%	33%	9%	2%	-	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2018

Pada table 4.5 dapat dijelaskan bahwa pertanyaan pertama indikator penilaian dengan pertanyaan “Pengawasan dari inspektorat sangat membantu proses berjalannya program dana BOS” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 38 orang dengan presentase 36 %, yang artinya sebanyak 36% responden yang sangat setuju jika pengawasan dari inspektorat sangat membantu proses berjalannya program dana BOS, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 52 orang dengan presentase 50 %, yang artinya sebanyak 50% responden yang setuju dengan pengawasan dari inspektorat yang sangat membantu proses berjalannya program dana BOS, yang menjawab Netral (N) sebanyak 12 orang dengan presentase 12%, yang artinya sebanyak 12% responden yang tidak mengetahui apakah

pengawasan dari inspektorat sangat membantu proses berjalannya program dana BOS atau tidak, dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 orang dengan presentase 2 %, yang artinya sebanyak 2% responden yang tidak setuju mengenai pengawasan dari inspektorat sangat membantu proses berjalannya program dana BOS, sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Pada indikator penilaian dengan pertanyaan “Inspektorat langsung memeriksa saat tiba di lokasi” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 44 orang dengan presentase 42 %, yang artinya sebanyak 42% responden yang sangat setuju mengenai inspektorat langsung memeriksa saat tiba di lokasi, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 36 orang dengan presentase 35 %, yang artinya sebanyak 35% responden yang setuju mengenai inspektorat langsung memeriksa saat tiba di lokasi, yang menjawab Netral (N) sebanyak 22 orang dengan presentase 21%, yang artinya sebanyak 21% responden yang tidak mengetahui apakah pegawai Inspektorat langsung memeriksa saat tiba di lokasi atau tidak dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 orang dengan presentase 2 %, yang artinya sebanyak 2% responden tidak setuju dengan pernyataan Inspektorat langsung memeriksa saat tiba di lokasi, sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Pada indikator penilaian dengan pertanyaan “Inspektorat sangat disiplin dalam proses pemeriksaan ” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 58 orang dengan presentase 56 %, yang artinya sebanyak 56% responden yang menjawab sangat setuju mengenai Inspektorat sangat disiplin dalam proses pemeriksaan , yang menjawab Setuju (S) sebanyak 34 orang dengan presentase 33 %, yang

artinya sebanyak 33% responden yang setuju jika Inspektorat sangat disiplin dalam proses pemeriksaan, yang menjawab Netral (N) sebanyak 9 orang dengan presentase 9%, yang artinya sebanyak 9% responden yang tidak mengetahui apakah Inspektorat sangat disiplin dalam proses pemeriksaan atau tidak dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 orang dengan presentase 2 %, yang artinya sebanyak 2% responden yang tidak setuju tentang Inspektorat sangat disiplin dalam proses pemeriksaan , sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

c. Pengadaan Koreksi

Mengadakan korektif, adalah tindakan mengoreksi atau mengevaluasi berbagai metode pengawasan inspektorat, seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan. Untuk mengetahui pendapat responden tentang indikator pengadaan koreksi sebagai berikut :

Tabel 4.8. Deskripsi Indikator Pengadaan Koreksi

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Inspektorat selalu berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan	53	41	9	1	-	104
	Presentase (%)	51%	39%	9%	1%	-	100%
2	Pengawasan dilakukan untuk mengambil tindakan koreksi langsung kepada pegawai apabila terjadi penyimpangan pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS	49	37	16	2	-	104
	Presentase (%)	47%	35%	15%	2%	-	100%
3	Pihak sekolah tepat waktu dalam penyediaan laporan alokasi dana BOS	58	34	12	-	-	104
	Presentase (%)	56%	33%	11%	-	-	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2018

Pada table 4.6 dapat dijelaskan bahwa pertanyaan pertama indikator pengadaan koreksi dengan pertanyaan “Inspektorat selalu berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 53 orang dengan presentase 51 %, yang artinya sebanyak 51% responden yang sangat setuju mengenai Inspektorat yang selalu berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 41 orang dengan presentase 39 %, yang artinya sebanyak 39% responden yang setuju mengenai Inspektorat yang selalu berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan, yang menjawab Netral (N) sebanyak 9 orang dengan presentase 9%, yang artinya sebanyak 9% responden yang tidak mengetahui apakah inspektorat selalu berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan, dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 1 orang dengan presentase 1 %, yang artinya sebanyak 1% responden yang tidak setuju dengan pernyataan inspektorat selalu berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan, sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

indikator pengadaan koreksi dengan pertanyaan “Pengawasan dilakukan untuk mengambil tindakan koreksi langsung kepada pegawai apabila terjadi penyimpangan pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 49 orang dengan presentase 47 %, yang artinya sebanyak 47% responden yang sangat setuju mengenai pernyataan Pengawasan dilakukan untuk mengambil tindakan koreksi langsung kepada pegawai apabila

terjadi penyimpangan pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 37 orang dengan presentase 35 %, yang artinya sebanyak 35% responden yang setuju mengenai pengawasan dilakukan untuk mengambil tindakan koreksi langsung kepada pegawai apabila terjadi penyimpangan pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS, , yang menjawab Netral (N) sebanyak 16 orang dengan presentase 15 %, yang artinya sebanyak 15% responden yang tidak mengetahui apakah pengawasan dilakukan untuk mengambil tindakan koreksi langsung kepada pegawai atau tidak apabila terjadi penyimpangan pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 orang dengan presentase 2%, yang artinya sebanyak 2% responden yang tidak setuju dengan pernyataan pengawasan dilakukan untuk mengambil tindakan koreksi langsung kepada pegawai apabila terjadi penyimpangan pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS , sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

indikator pengadaan koreksi dengan pertanyaan “Pihak sekolah tepat waktu dalam penyediaan laporan alokasi dana BOS” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 58 orang dengan presentase 56 %, yang artinya sebanyak 56% responden sangat setuju mengenai pihak sekolah tepat waktu dalam penyediaan laporan alokasi dana BOS, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 34 orang dengan presentase 33 %, yang artinya sebanyak 33% responden yang setuju mengenai pihak sekolah tepat waktu dalam penyediaan laporan alokasi dana BOS, yang menjawab Netral (N) sebanyak 12 orang dengan presentase 11 %, yang artinya sebanyak 11% responden yang tidak mengetahui apakah pihak sekolah tepat

waktu dalam penyediaan laporan alokasi dana BOS dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Dari hasil skoring di dapatkan dari hasil penelitian Penilaian Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) yaitu :

$$\text{Indikator} = \frac{\text{Jumlah skor responden}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100 = \text{jumlah skor perolehan}$$

$$\text{Layanan 5S} = \frac{4049}{4680} \times 100 = 86,5 \% \text{ atau } 86 \%$$

Berdasarkan hasil penjumlahan secara keseluruhan variabel X indikator Penilaian Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare di dapatkan nilai rata-rata 86 %, nilai tersebut di dapatkan dari jumlah skor responden di bagi jumlah skor ideal di kali 100. Hasil dari rata-rata tersebut yaitu dapat di simpulkan bahwa indikator pengaruh Penilaian Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare masuk dalam kategori “sangat tinggi” berpengaruh terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.

3. Deskripsi Variabel Efektifitas (Y)

Untuk mengetahui seberapa besar pendapat responden efektifitas dimana terdiri dari empat variable yaitu kualitas, produktifitas, efisiensi, semangat kerja digunakan frekuensi dan presentase. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan presentase untuk mengukur adalah sebagai berikut :

a. Kualitas

Kualitas adalah hasil yang terdapat pada kinerja inspektorat di kota pare pare.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang indicator kualitas sebagai berikut :

Tabel 4.9. Deskripsi Indikator kualitas

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Para pegawai inspektorat berpakaian rapi saat melakukan kegiatan pengawasan	51	47	6	-	-	104
	Presentase (%)	49%	45%	6%	-	-	100%
2	Inspektorat selalu menunjukkan kesabaran dalam pemeriksaan	58	38	8	-	-	104
	Presentase (%)	56%	36%	8%	-	-	100%
3	Kecermatan inspektorat dalam proses pemeriksaan	57	40	7	-	-	104
	Presentase (%)	55%	38%	7%	-	-	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2018

Pada table 4.7 dapat dijelaskan bahwa pertanyaan pertama indikator kualitas dengan pertanyaan “Para pegawai inspektorat berpakaian rapi saat melakukan kegiatan pengawasan” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 51 orang dengan presentase 49 %, yang artinya sebanyak 49% yang sangat setuju dengan pernyataan para pegawai inspektorat berpakaian rapi saat melakukan kegiatan pengawasan, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 47 orang dengan presentase 45 %, yang artinya sebanyak 45% yang setuju melihat para pegawai inspektorat berpakaian rapi saat melakukan kegiatan pengawasan, yang menjawab Netral (N) sebanyak 6 orang dengan presentase 6%, yang artinya tidak memperhatikan apakah para pegawai inspektorat berpakaian rapi saat melakukan kegiatan pengawasan dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Indikator pengadaan koreksi dengan pertanyaan “Inspektorat selalu menunjukkan kesabaran dalam pemeriksaan” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 58 orang dengan presentase 56 %, yang artinya sebanyak 56% responden yang sangat setuju dengan Inspektorat selalu menunjukkan kesabaran dalam pemeriksaan, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 38 orang dengan presentase 36 %, yang artinya sebanyak 36% responden yang setuju dengan Inspektorat selalu menunjukkan kesabaran dalam pemeriksaan, yang menjawab Netral (N) sebanyak 8 orang dengan presentase 8%, yang artinya sebanyak 8% responden yang tidak yakin apakah Inspektorat selalu menunjukkan kesabaran dalam pemeriksaan dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Indikator kualitas dengan pertanyaan “Kecermatan inspektorat dalam proses pemeriksaan” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 57 orang dalam proses pemeriksaan presentase 55 %, yang artinya sebanyak 55% responden yang sangat setuju dengan kecermatan yang dilakukan inspektorat, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 40 orang dengan presentase 38 %, yang artinya sebanyak 38% responden yang setuju dengan kecermatan yang dilakukan inspektorat, yang menjawab Netral (N) sebanyak 7 orang dengan presentase 7%, yang artinya sebanyak 7% responden yang tidak mengetahui dengan kecermatan yang dilakukan inspektorat dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

b. Produktifitas

Produktivitas adalah kuantitas dari jasa yang dihasilkan pada kinerja inspektorat. Untuk mengetahui pendapat responden tentang indikator produktifitas sebagai berikut:

Tabel 4.10. Deskripsi Indikator Produktifitas

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Inspektorat memiliki ide-ide baru dalam pengawasan sehingga pihak sekolah tidak bosan dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat	28	45	21	10	-	104
	Presentase (%)	27%	43%	20%	9%		100%
2	Para pegawai inspektorat mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki	51	47	6	-	-	104
	Presentase (%)	49%	45%	6%	-	-	100%
3	Para pegawai inspektorat selalu hadir pada saat kegiatan pemeriksaan dana BOS di Sekolah	58	38	8	-	-	104
	Presentase (%)	56%	36%	8%	-	-	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2018

Pada table 4.8 dapat dijelaskan bahwa pertanyaan pertama indikator produktifitas dengan pertanyaan “Inspektorat selalu berusaha memperbaiki terhadap kesalahan yang lakukan dalam melaksanakan pengawasan” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 28 orang dengan presentase 27 %, yang artinya sebanyak 27% responden yang sangat setuju dengan Inspektorat yang memiliki ide-ide baru dalam pengawasan sehingga pihak sekolah tidak bosan dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 45 orang dengan presentase 43 %, yang artinya sebanyak 43% yang setuju dengan Inspektorat memiliki ide-ide baru dalam pengawasan sehingga pihak sekolah tidak bosan dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat, yang menjawab

Netral (N) sebanyak 21 orang dengan presentase 20 %, yang artinya sebanyak 20% yang tidak mengetahui apakah inspektorat memiliki ide-ide baru dalam pengawasan sehingga pihak sekolah tidak bosan dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 10 orang dengan presentase 9 %, yang artinya sebanyak 9% responden yang tidak setuju dengan Inspektorat memiliki ide-ide baru dalam pengawasan sehingga pihak sekolah tidak bosan dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Indikator produktifitas dengan pertanyaan “Inspektorat sangat menjaga ketepatan waktu pada saat pemeriksaan” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 51 orang dengan presentase 49 %, yang artinya sebanyak 49% yang sangat setuju dengan Inspektorat sangat menjaga ketepatan waktu pada saat pemeriksaan, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 47 orang dengan presentase 45 %, yang artinya sebanyak 45% yang setuju dengan Inspektorat sangat menjaga ketepatan waktu pada saat pemeriksaan yang menjawab Netral (N) sebanyak 6 orang dengan presentase 6%, yang artinya sebanyak 6% responden yang tidak mengetahui apakah Inspektorat sangat menjaga ketepatan waktu pada saat pemeriksaan dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Indikator produktifitas dengan pertanyaan “Inspektorat memiliki ide-ide baru dalam pengawasan sehingga pihak sekolah tidak bosan dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 58 orang dengan presentase 56 %, yang artinya sebanyak 56% responden yang sangat

setuju dengan Inspektorat memiliki ide-ide baru dalam pengawasan sehingga pihak sekolah tidak bosan dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 38 orang dengan presentase 36 %, yang artinya sebanyak 36% responden yang setuju dengan Inspektorat memiliki ide-ide baru dalam pengawasan sehingga pihak sekolah tidak bosan dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat, yang menjawab Netral (N) sebanyak 8 orang dengan presentase 8%, yang artinya sebanyak 8% yang tidak mengetahui apakah Inspektorat memiliki ide-ide baru dalam pengawasan sehingga pihak sekolah tidak bosan dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat, dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

c. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan dari beberapa aspek pada kinerja inspektorat terhadap dana BOS. Untuk mengetahui pendapat responden tentang indikator efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4.11. Deskripsi Indikator Efisiensi

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Inspektorat memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin dalam proses pemeriksaan dana BOS	57	40	6	1	-	104
	Presentase (%)	55%	38%	6%	1%		100%
2	Inspektorat memberikan teguran terhadap sekolah jika terdapat penyalagunaan dana BOS	30	43	21	10	-	104
	Presentase (%)	29%	41%	20%	10%		100%
3	Kejujuran pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS	50	47	7	-	-	104
	Presentase (%)	48%	45%	7%	-	-	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2018

Pada table 4.9 dapat dijelaskan bahwa pertanyaan pertama indikator efisiensi dengan pertanyaan “Inspektorat memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin dalam proses pemeriksaan dana BOS” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 57 orang dengan presentase 55 %, yang artinya sebanyak 55% responden yang sangat setuju dengan Inspektorat memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin dalam proses pemeriksaan dana BOS, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 40 orang dengan presentase 38 %, yang artinya sebanyak 38% responden yang setuju dengan Inspektorat memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin dalam proses pemeriksaan dana BOS, yang menjawab Netral (N) sebanyak 6 orang dengan presentase 6 %, yang artinya sebanyak 6% responden yang tidak mengetahui apakah Inspektorat memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin dalam proses pemeriksaan dana BOS dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 1 orang dengan presentase 1 %, yang artinya sebanyak 1% responden yang tidak setuju dengan Inspektorat memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin dalam proses pemeriksaan dana BOS sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Indikator efisiensi dengan pertanyaan “Inspektorat memberikan teguran terhadap sekolah jika terdapat penyalagunaan dana BOS” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 30 orang dengan presentase 29 %, yang artinya sebanyak 29% responden yang sangat setuju dengan Inspektorat memberikan teguran terhadap sekolah jika terdapat penyalagunaan dana BOS, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 43 orang dengan presentase 41 %, yang artinya sebanyak 41%

responden yang setuju dengan Inspektorat memberikan teguran terhadap sekolah jika terdapat penyalagunaan dana BOS, yang menjawab Netral (N) sebanyak 21 orang dengan presentase 20 % yang artinya sebanyak 10% yang tidak mengetahui apakah Inspektorat memberikan teguran terhadap sekolah jika terdapat penyalagunaan dana BOS dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 10 orang dengan presentase 10 % yang artinya sebanyak 10% responden yang tidak setuju dengan Inspektorat memberikan teguran terhadap sekolah jika terdapat penyalagunaan dana BOS sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Indikator efisiensi dengan pertanyaan “Kejujuran pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 50 orang dengan presentase 48 %, yang artinya sebanyak 48% responden yang sangat setuju dengan Kejujuran pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 57 orang dengan presentase 45 %, yang artinya sebanyak 45% responden yang setuju dengan Kejujuran pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS yang menjawab Netral (N) sebanyak 7 orang dengan presentase 7 %, yang artinya sebanyak 7% responden yang tidak mengetahui apakah Kejujuran pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS atau tidak, yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

d. Semangat Kerja

Semangat kerja adalah adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan yang melibatkan usaha pada pegawai. Untuk mengetahui pendapat responden tentang indikator semangat kerja sebagai berikut:

Tabel 4.12. Deskripsi Indikator Semangat Kerja

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Pihak sekolah memberikan pelayanan yang baik terhadap para pegawai inspektorat dalam proses pengawasan	59	38	7	-	-	104
	Presentase (%)	57%	36%	7%	-	-	100%
2	Inspektorat selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan pengawasan berlangsung	57	40	6	1	-	104
	Presentase (%)	55%	38%	6%	1%		100%
3	Inspektorat melaksanakan pekerjaan dengan semangat tanpa mengeluh	28	50	20	6	-	104
	Presentase (%)	27%	48%	19%	6%		100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2018

Pada table 4.10 dapat dijelaskan bahwa pertanyaan pertama indikator semangat kerjai dengan pertanyaan “Pihak sekolah memberikan pelayanan yang baik terhadap para pegawai inspektorat dalam proses pengawasan” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 59 orang dengan presentase 57 %, yang artinya sebanyak 57% responden yang sangat setuju dengan Pihak sekolah memberikan pelayanan yang baik terhadap para pegawai inspektorat dalam proses pengawasan, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 38 orang dengan presentase 36 %, yang artinya sebanyak 36% responden yang setuju dengan Pihak sekolah memberikan pelayanan yang baik terhadap para pegawai inspektorat dalam proses pengawasan, yang menjawab Netral (N) sebanyak 7 orang dengan presentase 7 %,

yang artinya sebanyak 7% responden yang tidak mengetahui apakah Pihak sekolah memberikan pelayanan yang baik terhadap para pegawai inspektorat dalam proses pengawasan atau tidak, yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Indikator semangat kerja dengan pertanyaan “Inspektorat selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan pengawasan berlangsung” yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 57 orang dengan presentase 55 %, yang artinya sebanyak 55% responden yang sangat setuju dengan Inspektorat selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan pengawasan berlangsung, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 40 orang dengan presentase 38 %, yang artinya sebanyak 38% responden yang setuju dengan Inspektorat selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan pengawasan berlangsung, yang menjawab Netral (N) sebanyak 6 orang dengan presentase 6 %, yang artinya sebanyak 6% responden yang tidak mengetahui apakah Inspektorat selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan pengawasan berlangsung atau tidak dan yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 1 orang dengan presentase 1 %, yang artinya sebanyak 1% responden yang tidak setuju dengan Inspektorat selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan pengawasan berlangsung, sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Indikator semangat kerja dengan pertanyaan “Inspektorat melaksanakan pekerjaan dengan semangat tanpa mengeluh.” yang menjawab Sangat Setuju (SS)

sebanyak 28 orang dengan presentase 27 %, yang artinya sebanyak 27% yang sangat setuju dengan Inspektorat melaksanakan pekerjaan dengan semangat tanpa mengeluh. yang menjawab Setuju (S) sebanyak 50 orang dengan presentase 48 %, yang artinya sebanyak 48% responden yang setuju dengan Inspektorat melaksanakan pekerjaan dengan semangat tanpa mengeluh. yang menjawab Netral (N) sebanyak 20 orang dengan presentase 19 %, yang artinya sebanyak 19% responden tidak mengetahui apakah Inspektorat melaksanakan pekerjaan dengan semangat tanpa mengeluh atau tidak. yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 6 orang dengan presentase 6 %, yang artinya sebanyak 6% responden yang tidak setuju dengan Inspektorat melaksanakan pekerjaan dengan semangat tanpa mengeluh. sedangkan yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) tidak didapati.

Dari hasil skoring di dapatkan dari hasil penelitian Kinerja Pegawai (kualitas, produktifitas, efisiensi dan semangat kerja) yaitu :

$$\text{Indikator} = \frac{\text{Jumlah skor responden}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100 = \text{jumlah skor perolehan}$$

$$\text{Layanan 5S} = \frac{5391}{6240} \times 100 = 86,3 \% \text{ atau } 86 \%$$

Berdasarkan hasil penjumlahan secara keseluruhan variabel Y indikator Efektifitas (kualitas, produktifitas, efisiensi dan semangat kerja) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare di dapatkan nilai rata-rata 86 %, nilai tersebut di dapatkan dari jumlah skor responden di bagi jumlah skor ideal di kali 100. Hasil dari rata-rata tersebut yaitu dapat di simpulkan bahwa indikator

pengaruh Penilaian Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare masuk dalam kategori “sangat tinggi” berpengaruh terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.

4. Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji hipotesis dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis data yang meliputi :

a. Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas digunakan untuk benar-benar mengukur apa yang di ukur dan mengetahui bahwa suatu kuesioner di anggap valid ataupun tidak. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu bahwa jika r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan tersebut di anggap valid/ sah. Begitupun sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel (pada taraf signifikansi 5%) maka pertanyaan tersebut tidak valid/ sah sehingga tidak dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Untuk menguji validitas, 50 kuesioner yang akan diuji. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R Tabel	Keterangan
Pengawasan Inspektorat (Ukuran Pelaksanaan, Penilaian, Pengadaan Koreksi) (X)	Item 1	0,719	0,190	Valid
	Item 2	0,705	0,190	Valid
	Item 3	0,624	0,190	Valid
	Item 4	0,642	0,190	Valid
	Item 5	0,708	0,190	Valid
	Item 6	0,657	0,190	Valid
	Item 7	0,715	0,190	Valid
	Item 8	0,636	0,190	Valid
	Item 9	0,623	0,190	Valid
Efektifitas (Kualitas, Produktivitas,	Item 1	0,649	0,190	Valid
	Item 2	0,713	0,190	Valid
	Item 3	0,687	0,190	Valid

Efisiensi, semangat Kerja) (Y)	Item 4	0,609	0,190	Valid
	Item 5	0,649	0,190	Valid
	Item 6	0,713	0,190	Valid
	Item 7	0,687	0,190	Valid
	Item 8	0,609	0,190	Valid
	Item 9	0,649	0,190	Valid
	Item 10	0,713	0,190	Valid
	Item 11	0,687	0,190	Valid
	Item 12	0,609	0,190	Valid

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan item pertanyaan memiliki korelasi yang lebih dari r tabel = 0,190 (nilai r tabel didapatkan dari $n = 104$) dan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat di percaya atau diandalkan. Dalam hal ini, hasil pengukuran kuesioner konsisten atau tetap bila dilakukan pengukuran berulang dan dapat digunakan lebih dari satu kali. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai koefisien $\alpha > 0,60$ maka kuesioner dinyatakan reliabel/handal (Noor Juliansyah, 2012).

Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	r tabel	Keterangan
Pengawasan Inspektorat (Ukuran Pelaksanaan, Penilaian, Pengadaan Koreksi) (X)	0,763	0,60	Reliabel
Efektifitas (Kualitas, Produktivitas, Efisiensi, semangat Kerja) (Y)	0,759	0,60	Reliabel

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan item pertanyaan lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan reliabel artinya kuesioner tersebut dapat digunakan lebih dari satu kali dan dapat diandalkan (Noor Juliansyah, 2012).

b. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan mengetahui data dari masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah rumus Kolmogorov Smirnov pada program komputer. Jika nilai kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan 5% maka data tersebut tidak berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai Asymp.Sig \geq 5% maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.45658614
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.069
	Negative	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.797
Asymp. Sig. (2-tailed)		.549

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa bahwa tingkat signifikan sebesar 0,549 lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi normal.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam model regresi. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel bebas harus terbebas dari korelasi yang tinggi antara variabel bebas. Hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat akan terganggu jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya. Hal

ini mengakibatkan model regresi yang diperoleh menjadi tidak valid. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23.187	3.872		5.989	.000		
Pengawasan Inspektorat	.736	.099	.594	7.448	.000	1.000	1.000

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa nilai tolerance 1,000 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,000 lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.482	2.320		1.932	.056
Pengawasan Inspektorat	-.024	.059	-.040	-.405	.686

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dijelaskan bahwa tingkat signifikan pengawasan inspektorat 0,686 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian.

e. Uji Hipotesis

1) Ukuran Pelaksanaan

Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18. Hasil Uji Regresi Indikator Ukuran Pelaksanaan Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.881	3.694		7.818	.000
Ukuran Pelaksanaan	1.791	.286	.527	6.264	.000

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.16 maka diperoleh rumus regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 28,881 + 1,791 X_1$$

Berdasarkan persamaan diatas maka diperoleh nilai konstan positif sebesar 28,881. Hal ini menunjukkan jika indicator ukuran pelaksanaan, konstan atau sama dengan nol (0), maka nilai efektifitas alokasi dana BOS bernilai 28,881. Sedangkan koefisien regresi ukuran pelaksanaan, bernilai positif yaitu 1,791. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ukuran pelaksanaan berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Artinya jika Variabel nilai ukuran pelaksanaan ditingkatkan maka efektifitas alokasi dana BOS akan meningkat.

Tabel 4.19 Hasil Koefisien Determinasi Hubungan Ukuran Pelaksanaan Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.278	.271	4.729

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dijelaskan bahwa kontribusi ukuran pelaksanaan sebesar 0,278 atau 27,8 % terhadap efektivitas alokasi dan BOS, sedangkan 72,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

2) Penilaian

Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20. Hasil Uji Regresi Indikator Penilaian Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30.296	3.174		9.544	.000
Penilaian	1.676	.244	.562	6.856	.000

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.18 maka diperoleh rumus regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 30,296 + 1,676 X_2$$

Berdasarkan persamaan diatas maka diperoleh nilai konstan positif sebesar 30,296. Hal ini menunjukkan jika indikator penilaian, konstan atau sama dengan nol (0), maka nilai efektivitas alokasi dana BOS bernilai 30,296. Sedangkan koefisien regresi penilaian, bernilai positif yaitu 1,676. Hal ini menunjukkan bahwa nilai penilaian berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Artinya jika indikator nilai penilaian ditingkatkan maka efektivitas alokasi dana BOS akan meningkat.

**Tabel 4.21 Hasil Koefisien Determinasi
Hubungan Penilaian Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	.315	.309	4.604

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dijelaskan bahwa kontribusi ukuran pelaksanaan sebesar 0,315 atau 31,5 % terhadap efektivitas alokasi dan BOS, sedangkan 68,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

3) Pengadaan Koreksi

Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22. Hasil Uji Regresi Indikator Pengadaan Koreksi Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	36.436	3.566		10.216	.000
Pengadaan Koreksi	1.161	.266	.396	4.362	.000

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.20 maka diperoleh rumus regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 36,436 + 1,161 X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas maka diperoleh nilai konstan positif sebesar 36,436. Hal ini menunjukkan jika indicator pengadaan koreksi, konstan atau sama dengan nol (0), maka nilai efektifitas alokasi dana BOS bernilai 36,436. Sedangkan koefisien regresi pengadaan koreksi, bernilai positif yaitu 1,161. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengadaan koreksi berpengaruh positif terhadap

Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Artinya jika indikator nilai pengadaan koreksi ditingkatkan maka efektivitas alokasi dana BOS akan meningkat.

Tabel 4.23 Hasil Koefisien Determinasi Hubungan Pengadaan Koreksi Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.396 ^a	.157	.149	5.108

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dijelaskan bahwa kontribusi ukuran pelaksanaan sebesar 0,157 atau 15,7 % terhadap efektivitas alokasi dan BOS, sedangkan 84,3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4) Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare Secara Keseluruhan

Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24. Hasil Uji Regresi Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.187	3.872		5.989	.000
Pengawasan Inspektorat	.736	.099	.594	7.448	.000

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.22 maka diperoleh rumus regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 23,187 + 0,736 X$$

Berdasarkan persamaan diatas maka diperoleh nilai konstan positif sebesar 23,187. Hal ini menunjukkan jika variable pengawasan inspektorat, konstan atau

sama dengan nol (0), maka nilai efektifitas alokasi dana BOS bernilai 23,187. Sedangkan koefisien regresi pengawasan inspektorat, bernilai positif yaitu 0,736. Hal ini menunjukkan bahwa nilai variable pengawasan inspektorat berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Artinya jika nilai pengawasan inspektorati ditingkatkan maka efektivitas alokasi dana BOS akan meningkat.

Tabel 4.25 Hasil Koefisien Determinasi Hubungan Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.594 ^a	.352	.346	4.478

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.23 dapat dijelaskan bahwa kontribusi ukuran pelaksanaan sebesar 0,352 atau 35,2 % terhadap efektivitas alokasi dan BOS, sedangkan 64,8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Tabel 4.26 Hasil Uji f Hubungan Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1112.522	1	1112.522	55.471	.000 ^b
Residual	2045.699	102	20.056		
Total	3158.221	103			

Sumber: SPSS Versi 21

Berdasarkan tabel 4.24 diatas, menunjukkan hasil nilai F hitung 55,471 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan variabel pengawasan inspektorat dapat digunakan untuk memprediksi Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare

Tabel 4.27 Hasil Uji t
Hubungan Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.187	3.872		5.989	.000
Pengawasan Inspektorat	.736	.099	.594	7.448	.000

Sumber: SPSS Versi 21

Hasil uji t pada tabel 4.25 menjelaskan bahwa nilai signifikan pengawasan inspektorat sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sedangkan t hitungnya sebesar 5,989. Artinya bahwa variabel pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan inspektorat sebesar positif 0,736 yang menunjukkan bahwa variabel pengawasan inspektorat berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Dengan hasil ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penjumlahan secara keseluruhan:

1. Variabel X indikator Pengawasan Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare di dapatkan nilai rata-rata 86 %, nilai tersebut di dapatkan dari jumlah skor responden di bagi jumlah skor ideal di kali 100. Hasil dari rata-rata tersebut yaitu dapat di simpulkan bahwa indikator pengaruh Pengawasan Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare masuk dalam kategori

“sangat tinggi” berpengaruh terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.

2. Variabel Y indikator Efektifitas (kualitas, produktifitas, efisiensi dan semangat kerja) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare di dapatkan nilai rata-rata 86 %, nilai tersebut di dapatkan dari jumlah skor responden di bagi jumlah skor ideal di kali 100. Hasil dari rata-rata tersebut yaitu dapat di simpulkan bahwa indikator pengaruh Pengawasan Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare masuk dalam kategori “sangat tinggi” berpengaruh terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.
3. Berdasarkan hasil uji regresi indicator pelaksanaan diperoleh nilai konstan positif sebesar 28,881. Hal ini menunjukkan jika indicator ukuran pelaksanaan, konstan atau sama dengan nol (0), maka nilai efektifitas alokasi dana BOS bernilai 28,881. Sedangkan koefisien regresi ukuran pelaksanaan, bernilai positif yaitu 1,791. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ukuran pelaksanaan berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Artinya jika Variabel nilai ukuran pelaksanaan ditingkatkan maka efektifitas alokasi dana BOS akan meningkat dengan kontribusi ukuran pelaksanaan sebesar 0,278 atau 27,8 % terhadap efektifitas alokasi dan BOS
4. hasil uji regresi indikator penilaian diperoleh nilai konstan sebesar 30,296. Hal ini menunjukkan jika indikator penilaian, konstan atau sama dengan nol (0), maka nilai efektifitas alokasi dana BOS bernilai 30,296. Sedangkan koefisien regresi penilaian, bernilai positif yaitu 1,676. Hal ini menunjukkan

bahwa nilai penilaian berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Artinya jika indikator nilai penilaian ditingkatkan maka efektivitas alokasi dana BOS akan meningkat dengan kontribusi ukuran pelaksanaan sebesar 0,315 atau 31,5 % terhadap efektivitas alokasi dan BOS.

5. uji regresi indikator pengadaan koreksi diperoleh nilai konstan positif sebesar 36,436. Hal ini menunjukkan jika indikator pengadaan koreksi, konstan atau sama dengan nol (0), maka nilai efektivitas alokasi dana BOS bernilai 36,436. Sedangkan koefisien regresi pengadaan koreksi, bernilai positif yaitu 1,161. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengadaan koreksi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Artinya jika indikator nilai pengadaan koreksi ditingkatkan maka efektivitas alokasi dana BOS akan meningkat dengan kontribusi ukuran pelaksanaan sebesar 0,157 atau 15,7 % terhadap efektivitas alokasi dan BOS.
6. Hasil uji regresi sederhana pengaruh pengawasan inspektorat terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare diperoleh nilai konstan positif sebesar 23,187. Hal ini menunjukkan jika variable pengawasan inspektorat, konstan atau sama dengan nol (0), maka nilai efektivitas alokasi dana BOS bernilai 23,187. Sedangkan koefisien regresi pengawasan inspektorat, bernilai positif yaitu 0,736. Hal ini menunjukkan bahwa nilai variable pengawasan inspektorat berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Artinya jika nilai pengawasan inspektorati ditingkatkan maka efektivitas alokasi dana BOS akan meningkat

dengan kontribusi ukuran pelaksanaan sebesar 0,352 atau 35,2 % terhadap efektivitas alokasi dan BOS

7. Hasil nilai F hitung 55,471 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan variabel pengawasan inspektorat dapat digunakan untuk memprediksi Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.
8. Hasil uji t menjelaskan bahwa nilai signifikan pengawasan inspektorat sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sedangkan t hitungnya sebesar 5,989. Artinya bahwa variabel pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan inspektorat sebesar positif 0,736 yang menunjukkan bahwa variabel pengawasan inspektorat berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Dengan hasil ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibuktikan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penjumlahan secara keseluruhan variabel X indikator Pengawasan Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare di dapatkan nilai rata-rata 86 %, nilai tersebut di dapatkan dari jumlah skor responden di bagi jumlah skor ideal di kali 100. Hasil dari rata-rata tersebut yaitu dapat di simpulkan bahwa indikator pengaruh Pengawasan Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare masuk dalam kategori “sangat tinggi” berpengaruh terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.
2. Berdasarkan hasil penjumlahan secara keseluruhan variabel Y indikator Efektifitas (kualitas, produktifitas, efisiensi dan semangat kerja) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare di dapatkan nilai rata-rata 86 %, nilai tersebut di dapatkan dari jumlah skor responden di bagi jumlah skor ideal di kali 100. Hasil dari rata-rata tersebut yaitu dapat di simpulkan bahwa indikator pengaruh Penilaian Inspektorat (ukuran pelaksanaan, penilaian, pengadaan koreksi) Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare masuk

dalam kategori “sangat tinggi” berpengaruh terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.

3. Hasil uji t menjelaskan bahwa nilai signifikan pengawasan inspektorat sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sedangkan t hitungnya sebesar 5,989. Artinya bahwa variabel pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan inspektorat sebesar positif 0,736 yang menunjukkan bahwa variabel pengawasan inspektorat berpengaruh positif terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare. Dengan hasil ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kedepannya Inspektorat Kota Pare-Pare agar meningkatkan semangat kerja terutama pada saat melakukan pengawasan maupun pada saat bekerja di kantor.
2. Disarankan pula agar Inspektorat lebih teliti dalam pemeriksaan pengalokasian dana BOS di tiap sekolah, mengoreksi setiap kesalahan yang dilakukan pihak sekolah terhadap dana BOS yang digunakan tidak sesuai pada porsinya.

3. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variable lain yang dapat mempengaruhi Alokasi Dana Bos selain dari variable yang diteliti pada penelitian ini.
4. Disarankan pula kepada pihak-pihak penerima dana BOS (Sekolah) agar dana BOS yang diterima bisa digunakan dengan sebenar-benarnya dan juga penggunaannya lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliani, Fitri. 2014. *Jurnal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*
- Agus, Yulianto. 2013. <http://download.portalgaruda.org/articel/Makassar> (5 November 2017)
- Arikunto, S. 2010. *Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Cahyono
- Arisofiyani. 2017. <http://BOS.Kemdikbud.go.id>. Makassar (13 November 2017)
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press
- Juniadi. 2014. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Mulyani, Fariza. 2014. *Skripsi Efektivitas Sistem Kearsipan Pada Balai Pelatihan*
- Nurmayani. 2012. *Jurnal Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*
- Riska, Dian. 2014. *Skripsi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pembangunan Kesejahteraan*.
- Siagian, P. 1978. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Gitakarya
- Singarimbun, Masri & Sofyan Effendy. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Edisi Revisi. PT. Pustaka LP3ES
- Strees, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Tondi, Eko. 2011. <http://Digilib.unila.ac.id>. Makassar (3 November 2017)

Winardi. 2000. *Asas-asas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju

Dokumen

Data Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pare-Pare

Data Inspektorat (parepare.co.ac)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK07/2010 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota

BIODATA PENELITI



Siti Aulia Rahma. R dilahirkan di Kabupaten Enrekang pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 1996. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Almarhum Rustan R dan Ibu Hariyati Said Pandi memiliki 1 saudara laki-laki yang bernama Muhammad Zulkifli R dan 1 saudara perempuan yang bernama Nurul Sagita R, S. Tr. Ak Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 39 Cakke Kabupaten Enrekang dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Anggeraja Kabupaten Enrekang lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di tahap selanjutnya pada SMA Negeri 1 Anggeraja Kabupaten Enrekang pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti juga merupakan salah seorang dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sosial Dan Politik pada periode 2016-2018 di bidang Seni Budaya dan Olahraga dan Sekretaris Bidang Ilmu. Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Pare-Pare”.